



# LAPORAN DELEGASI DPR RI

# 11<sup>TH</sup> EDITION OF THE BRICS PARLIAMENTARY FORUM

3-5 Juni 2025 Brasilia - Brazil







**LAPORAN**  
**DELEGASI BKSAP DPR RI MENGHADIRI**  
**11<sup>th</sup> EDITION OF THE BRICS PARLIAMENTARY FORUM**  
**3-5 JUNI 2025 DI BRASILIA - BRAZIL**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Beberapa tahun terakhir, BRICS kian memantapkan dirinya sebagai platform multilateral yang fundamental untuk kerja sama ekonomi dan untuk mempromosikan tata kelola global yang lebih inklusif.

Pada tahun 2025, Brasil mengambil alih jabatan presiden bergilir BRICS. Dengan moto "Memperkuat Kerja Sama Global Selatan untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", BRICS aktif mengangkat dua isu prioritas. Pertama: Kerja Sama Global Selatan, dan kedua Kemitraan BRICS untuk Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan.

Berdasarkan dua isu prioritas tersebut di atas, Brasil mengusulkan enam topik inti yang dijadikan Paduan selama memegang jabatan sebagai presidensi BRICS. Yaitu pertama Kerja Sama dalam Kesehatan Global, kedua Perdagangan, Investasi, dan Keuangan, ketiga Perubahan Iklim. Selanjutnya keempat Tata Kelola Kecerdasan Buatan, kelima Arsitektur Perdamaian dan Keamanan Multilateral serta terakhir Pengembangan Kelembagaan.

Sejak pertemuan pertamanya di Moskow pada tahun 2015 lalu, Forum Parlemen BRICS telah menjadi mekanisme penting untuk memperkuat dialog dan kerja sama antarparlemen antara negara-negara anggota.

Perlu disepakati scenario global dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks, seperti munculnya kebijakan proteksionis dan melemahnya multilateralisme. Ini adalah kesempatan yang tepat bagi BRICS untuk mengedepankan dialog antarparlemen dan menghasilkan resolusi atas isu-isu

penting yang merasuki tatanan dunia dan secara langsung memengaruhi negara-negara BRICS. Mengingat format blok yang diperluas, yang memberinya keterwakilan yang lebih besar.

Forum Parlemen BRICS ke-11 ini akan diselenggarakan di Gedung Kongres Nasional di Brasilia pada tanggal 4-5 Juni 2025. Agenda ini juga akan didahului dengan Pertemuan Anggota Parlemen Wanita BRICS dan Pertemuan Ketua Komite Urusan Internasional Parlemen BRICS, pada tanggal 3 Juni 2025.

## **B. Dasar Pengiriman Delegasi**

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Forum Parlemen BRICS ke-11 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025

## **C. Susunan Delegasi**

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Dr. Mardani Ali Sera	F. PKS	Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	M. Husein fadlulloh	F. Gerindra	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi

## **D. Tujuan Pengiriman Delegasi**

1. Menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil parlemen sebagai strategi dalam penguatan sosial, ekonomi dan tata kelola lingkungan.
2. Menyampaikan implementasi yang dapat Indonesia lakukan, terutama parlemen, mengenai kebijakan tentang sosial, ekonomi sekaligus tantangan serta potensi-potensi dari kebijakan yang telah dilakukan di Indonesia.
3. Memanfaatkan Sidang ke-11 Parlemen Negara Anggota BRICS untuk memperkuat dialog multilateral DPR RI dengan berbagai lembaga internasional dan negara-negara sahabat.

## **E. Visi Misi**

Adapun misi delegasi BKSAP DPR RI menghadiri agenda tersebut adalah:

1. Berkontribusi aktif untuk menyoroti langkah-langkah konkrit yang dapat dilakukan parlemen untuk mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan sosial ekonomi Masyarakat.

2. Memperkuat peran parlemen dan Sidang ke-11 Parlemen Negara Anggota BRICS sebagai wadah, peluang kerja sama serta memperkuat peran serta DPR RI di kancah internasional.

#### **F. Persiapan Pengiriman Delegasi**

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri BRICS Parliamentary Forum yang ke-11 ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.

## II. LAPORAN DELEGASI

### A. Agenda Delegasi

Wednesday 4 June 2025		Location
10:00	Official photo	Black Hall of the National Congress
10:30 - 12:00	Opening ceremony of the 11 <sup>th</sup> BRICS Parliamentary Forum	Plenary of the Federal Senate
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:30	1 <sup>st</sup> Working session: <b>BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health</b>	Plenary of the Federal Senate
15:30 - 17:00	2 <sup>nd</sup> Working Session: <b>BRICS Parliamentary Action in Search of New Paths for Economic Development</b>	Plenary of the Federal Senate
19:30 - 22:00	Official dinner of the 11th BRICS Parliamentary Forum	Itamaraty Palace
Thursday 5 June 2025		Location
09:00 - 10:30	3 <sup>rd</sup> Working Session: <b>BRICS Inter-Parliamentary Dialogue on Climate and Sustainability</b>	Plenary of the Federal Senate
10:30 - 12:00	4 <sup>th</sup> Working Session: <b>Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence</b>	Plenary of the Federal Senate
12:00 - 14:00	Working lunch	Chamber of Deputies Restaurant
14:00 - 15:30	5 <sup>th</sup> Working Session: <b>BRICS Parliaments United for the Reform of the Multilateral Peace and Security Architecture</b>	Plenary of the Federal Senate
15:30 - 17:00	6 <sup>th</sup> Working Session: <b>Towards Stronger and More Durable BRICS Inter-Parliamentary Cooperation</b>	Plenary of the Federal Senate
17:00 - 18:00	Closing session <i>Adoption of Final document and closing remarks</i>	Plenary of the Federal Senate

## **B. Kegiatan Delegasi**

BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) adalah kelompok negara berkembang yang memiliki peran besar dalam perekonomian global. Kelompok BRICS saat ini menjadi simbol kekuatan ekonomi baru sebagai penyeimbang dominasi negara Barat dalam tatanan ekonomi dunia. Sejalan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota tetap BRICS pada 6 Januari 2025, DPR RI untuk pertama kali menghadiri pertemuan tahunan BRICS Parliamentary Forum yang diadakan pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia, Brazil. Pertemuan BRICS Parliamentary Forum yang ke-11 tersebut dihadiri oleh parlemen dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—serta negara-negara seperti Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab, Nigeria, Ethiopia, Kuba, Bolivia, dan Mesir.

Pada sesi pembukaan perwakilan-perwakilan dari delegasi yang hadir menekankan urgensi peningkatan kerja sama antar negara-negara Selatan Global (Global South) dan penguatan kedaulatan negara-negara berkembang dalam menanggapi tantangan geopolitik saat ini. Para perwakilan tersebut juga menegaskan kembali prioritas jangka panjang BRICS, termasuk reformasi organisasi multilateral untuk meningkatkan representasi Afrika, Asia, dan Amerika Latin, serta mempromosikan transaksi perdagangan dalam mata uang lokal di antara negara-negara anggota.

Hal-hal yang disampaikan tersebut sejalan dengan tujuan utama BRICS, yaitu untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara anggotanya, serta untuk memperkuat pengaruh mereka di panggung global. BRICS juga bertujuan untuk menjadi penyeimbang kekuatan ekonomi dan politik dunia, terutama terhadap dominasi negara-negara Barat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggotanya.

Brics Parliamentary Forum ke 11 yang berlangsung di Brasilia tersebut menghasilkan dokumen deklarasi bersama (joint declaration) yang menggaris bawahi komitmen terhadap kerja sama internasional mengenai isu-isu strategis yang memengaruhi semua negara Brics seperti keberlanjutan, kecerdasan buatan, kerja sama antarpemerintah, keamanan, dan perdamaian. Deklarasi juga menyerukan tatanan internasional yang lebih adil, di mana negara-negara berkembang dapat ikut serta mengambil bagian dalam keputusan-keputusan utama. Deklarasi juga menekankan

mengenai multilateralisme, kekhawatiran mengenai hambatan perdagangan, dan pembangunan dengan kesetaraan gender.

### **C. Manfaat Bergabungnya Indonesia ke BRICS**

Bagi Indonesia sendiri, bergabung ke BRICS membawa sejumlah manfaat potensial, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Indonesia berpotensi memperluas pasar ekspor, meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan alternatif, dan mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi. Secara politis, Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih kuat dalam forum internasional dan memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Disamping itu, Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB) BRICS juga dapat menjadi alternatif sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia, dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan internasional lainnya.

Dalam konteks bergabungnya Indonesia ke Organisasi Internasional, persyaratan yang harus diikuti oleh Indonesia ketika akan bergabung ke BRICS lebih fleksibel jika dibandingkan dengan proses akses Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD yang mayoritas anggotanya adalah negara-negara Barat mengharuskan negara-negara yang sedang dalam proses akses untuk melakukan serangkaian penyesuaian kebijakan dan regulasi dengan standar yang berlaku di OECD.

Sementara untuk BRICS, negara anggota tidak harus melakukan serangkaian penyesuaian. Penilaian terhadap negara yang akan bergabung lebih berdasarkan pertimbangan strategis seperti; potensi peningkatan akses pasar, kerja sama ekonomi, posisi geopolitik, dan pengaruh global. Selain itu, negara juga melihat peluang untuk mengakses pembiayaan dari New Development Bank (NDB), diversifikasi ekonomi, serta memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya.

BRICS juga dapat meningkatkan daya tawar dan citra diplomasi Indonesia, mengingat bahwa BRICS adalah platform strategis negara-negara berkembang untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global. Dengan menjadi anggota, Indonesia dapat mendorong perubahan yang lebih inklusif, seperti distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga-lembaga

global seperti World Trade Organization (WTO) dan Bank Dunia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, Indonesia juga dapat memberikan perspektif baru di BRICS sebagai penyeimbang kebijakan ekonomi global, hal ini akan meningkatkan pengaruh diplomatik internasional Indonesia.

Pola pengembangan organisasi BRICS serupa dengan G20 dimana negara-negara BRICS menyelenggarakan beberapa forum untuk mendorong kerja sama dan dialog antar-anggotanya dan dengan negara-negara lain. Forum-forum ini antara lain Forum Parlemen BRICS (BRICS Parliamentary Forum), Forum Bisnis BRICS, Forum Akademik BRICS, dan Forum Serikat Buruh BRICS. Forum-forum ini membahas berbagai aspek kerja sama, mulai dari bisnis dan perdagangan hingga penelitian akademis dan hubungan ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan sesama anggota BRICS dan menggali potensi kerja sama di berbagai bidang.

#### **D. Agenda Pembahasan BRICS Parliamentary Forum**

Dalam konteks BRICS Parliamentary Forum, Delegasi Indonesia diwakili oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI yaitu Bapak Dr. Mardani Ali Sera dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera selaku Ketua BKSAP dan Bapak Hussein Fadlulloh dari Fraksi Partai Gerindra selaku Wakil Ketua BKSAP. Selama forum berlangsung, Delegasi hadir dan aktif menyampaikan pandangan dan posisi DPR RI dalam berbagai isu antara lain:

1. Working Session: Strengthening BRICS Trade in Current International Scenarios
2. Working Session: Promoting Investment and Technology for Sustainable Development
3. Working Session: BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health
4. Working Session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence
5. Working Session: BRICS Parliamentary United for the Reform of Multilateral Peace and Security Architecture.

## **E. Kontribusi Delegasi**

### **1. Working Session: Strengthening BRICS Trade in Current International Scenarios**

Pada sesi ini Ketua BKSAP Dr. Mardani Ali Sera menyampaikan pandangan DPR RI mengenai pentingnya menguatkan perdagangan diantara negara-negara anggota BRICS, terutama di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu karena perang dagang dan pemberlakuan tarif perdagangan secara sepihak oleh negara tertentu, yang berdampak kepada perekonomian global. BRICS memberikan kesempatan untuk memperluas perdagangan, meningkatkan kerja sama keuangan, transfer teknologi, dan pertukaran budaya, serta pendanaan dan investasi infrastruktur. Oleh karena itu, politisi PKS tersebut juga berharap bahwa BRICS tidak hanya akan meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota tetapi juga akan lebih meningkatkan ketahanan kolektif kita terhadap tantangan global.

Namun, penting juga untuk mempromosikan lebih banyak perdagangan dan investasi intra-BRICS serta menjajaki kemungkinan penggunaan mata uang lokal dan opsi pembayaran lain yang nyaman, sebagai metode strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita, sehingga kita dapat menangani ketidakpastian ekonomi global dengan lebih baik.

Sebagai forum alternatif bagi aspirasi negara-negara berkembang, BRICS berpotensi memperkuat multilateralisme dengan mengadvokasi reformasi tata kelola global, mendorong kerja sama ekonomi, dan mendorong tatanan internasional yang lebih adil dan setara yang mewakili kepentingan negara-negara ekonomi berkembang dan negara-negara berkembang. Mendorong WTO untuk lebih transparan, inklusif, dan memprioritaskan kepentingan semua anggota secara setara. Mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam setiap diskusi perdagangan.

### **2. Working Session: Promoting Investment and Technology for Sustainable Development**

Mempromosikan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada investasi dan transfer teknologi karena keduanya memungkinkan pertumbuhan ekonomi sambil menjaga integritas lingkungan dan

kesetaraan sosial. Khususnya di negara berkembang, investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, energi bersih, dan industri ramah lingkungan menawarkan tulang punggung keuangan untuk transisi hijau.

Namun, tidak semua negara memiliki cukup sumber daya atau kapasitas untuk memperoleh teknologi dan modal. Indonesia dalam hal ini, merupakan salah satu negara yang membutuhkan investasi dan alih teknologi agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh. Terkait hal itu, Delegasi DPR RI berpandangan bahwa BRICS dapat memberikan peluang pendanaan alternatif untuk mendukung infrastruktur penting dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara anggota, termasuk transisi energi.

BRICS juga menyediakan peluang kolaborasi di industri pertanian, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini penting bagi Indonesia karena kami memprioritaskan pencapaian swasembada pangan nasional sekaligus berkontribusi pada inisiatif penanggulangan kelaparan global. Lebih lanjut, BRICS juga menyediakan diversifikasi pasar dan peluang besar untuk kemitraan strategis dengan para anggotanya, yang meliputi Brasil di bidang pertanian, India di bidang teknologi, dan Tiongkok di bidang manufaktur. Kolaborasi ini akan memungkinkan transfer teknologi dan inovasi, yang akan meningkatkan daya saing produk nasional.

Lebih lanjut, Bank Pembangunan Baru (NDB) juga telah menyediakan pembiayaan di negara-negara berkembang terkait energi bersih dan efisiensi energi; infrastruktur sosial; dan infrastruktur digital. Dalam hal investasi dan alih teknologi, sebagai tambahan, Indonesia juga ingin mengemukakan mengenai kebijakan hilirisasi untuk dibahas dalam BRICS. Karena hilirisasi memerlukan investasi dan transfer teknologi yang signifikan untuk mempercepat proses hilir dalam mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Indonesia juga membutuhkan fasilitas pemrosesan dan teknologi mutakhir, yang sebagian besarnya disediakan melalui investasi dan kemitraan internasional.

### **3. Working Session: BRICS Inter-Parliamentary Alliance for Global Health**

Kerja sama kesehatan global sangat penting untuk melindungi penduduk di seluruh dunia dari risiko penyakit menular, yang dapat dengan cepat melintasi batas negara. Di dunia yang saling terhubung, wabah penyakit di mana pun dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis global, seperti yang ditunjukkan oleh pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, kerja sama kesehatan global juga memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan kesehatan, memperkuat sistem pelayanan kesehatan, dan mendorong akses yang adil terhadap sumber daya pelayanan kesehatan, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian cakupan kesehatan universal dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Delegasi Indonesia menyambut baik usulan kemitraan global untuk memberantas penyakit yang ditentukan secara sosial (SDD) dan penyakit tropis terabaikan (NTD), dengan fokus pada populasi rentan yang diinisiasi oleh BRICS di bawah kepemimpinan Brasil. Penghapusan SDD dan NTD dapat membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan 1 (tanpa kemiskinan), Tujuan 2 (tanpa kelaparan), Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi), Tujuan 10 (mengurangi ketimpangan), serta mengatasi perubahan iklim.

### **4. Working Session: Inter-Parliamentary Cooperation for Responsible and Inclusive Artificial Intelligence**

Indonesia mengakui manfaat penggunaan AI dan bagaimana inovasinya dapat menghasilkan terobosan teknologi dan kemajuan sosial dan ekonomi bagi negara. Namun, penggunaan AI, khususnya maraknya AI generatif (GenAI) untuk teks, gambar, video, dan bahkan kode komputer, dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap penikmatan hak asasi manusia serta pembangunan budaya dan inklusif.

Delegasi DPR RI melihat untuk konteks Indonesia, ada beberapa kasus di Indonesia di mana AI semakin memicu disinformasi dan berpotensi memicu kontroversi, merusak reputasi, atau memicu ketegangan sosial. Penipuan suara AI juga telah membuat korbannya harus

memverifikasi apakah penelepon benar-benar berasal dari lembaga yang kredibel. Belum lagi potensi bias algoritma yang dapat menghambat partisipasi orang-orang tertentu, menyesatkan hasil, dan mengabaikan konteks sosial dan historis suatu konteks.

Untuk itu Delegasi DPR RI mengedepankan beberapa poin penting untuk diperhatikan dalam pemanfaatan AI serta untuk memitigasi dampak negatifnya demi penggunaan dan pemanfaatan yang lebih bertanggung jawab dan inklusif:

Pertama, Delegasi DPR RI mencatat upaya positif yang dilakukan oleh BRICS dalam diskusi AI. Forum Parlemen BRICS perlu memperkuat debat tentang AI, terutama terkait tata kelolanya, baik di tingkat nasional maupun multilateral. Norma dan tanggapan multilateral yang tersedia saat ini terkait penggunaan AI, termasuk Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI yang diadopsi pada sesi ke-41 UNESCO pada tahun 2021, dapat menjadi panduan untuk diskusi lebih lanjut.

Kedua, dalam pengembangan tata kelola AI, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjawab, pertama dan terutama, pertanyaan etika seputar penggunaan AI. Pada tahun 2020, Indonesia merilis Strategi Nasional AI 2020-2045, dengan fokus utama pada Etika dan Kebijakan. Strategi ini menunjukkan bagaimana Indonesia menekankan urgensi etika dan ketersediaan kebijakan yang tepat sebagai hal yang fundamental bagi pengembangan AI.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi beberapa tantangan AI, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan undang-undang ini, AI dapat dianggap sebagai agen elektronik dan harus memenuhi serta mematuhi beberapa kewajiban hukum.

Namun itu saja tidak cukup. Tata kelola AI perlu menekankan kepatuhan penuh terhadap pertimbangan etika dan hak asasi manusia di semua tahap siklus hidup dan pengembangan sistem AI serta mendorong kolaborasi multipemangku kepentingan dan internasional untuk tata kelola AI. Memang merupakan hak masing-masing negara untuk mengembangkan AI, namun perlu kerja sama dan kolaborasi untuk membentuk masa depan di mana penggunaan AI aman, dapat dipercaya, andal, tidak memihak, etis, dan bertanggung jawab juga penting.

Oleh karena itu Delegasi DPR RI menyerukan pengembangan teknologi AI yang inklusif di mana semua negara, terutama negara berkembang dan negara-negara terbelakang tidak tertinggal dalam revolusi digital tersebut. DPR RI juga memandang penting bagi setiap negara untuk berkolaborasi lebih lanjut dalam upaya melestarikan budaya, suku, bahasa sebagai warisan, identitas, dan pengetahuan nasional. Kemajuan teknologi AI perlu mempertimbangkan warisan, identitas, dan pengetahuan nasional ini untuk memastikan bahwa semuanya tetap dapat diakses di masa depan. Contoh tindakan tersebut adalah dalam pengembangan Model Bahasa Besar Indonesia (LLM), di mana Indonesia berupaya mengurangi sentimen dan bias yang timbul dari penggunaan LLM asing.

Aspek ketiga yang disampaikan oleh Delegasi DPR RI adalah penggunaan AI di militer, mengingat sistem senjata mematikan dan otonom (LAWS) juga telah memanfaatkan perkembangan teknis tersebut. Masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk cara mengawasi operasional LAWS. Kita juga perlu menggarisbawahi bahwa ketika menyangkut penggunaan AI yang bertanggung jawab di militer, tidak ada pengurangan dan persyaratan terkait teknologi dan transfer pengetahuan yang dapat diterapkan.

#### **5. Working Session: BRICS Parliamentary United for the Reform of Multilateral Peace and Security Architecture.**

Pada sesi ini, Delegasi DPR RI memandang bahwa reformasi PBB dan Dewan Keamanannya merupakan suatu hal yang mendesak dan penting. Kita telah melihat banyak situasi di mana upaya untuk mengatasi ancaman dan pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional gagal. DPR RI percaya bahwa tantangan di abad ke-21 perlu ditangani dengan cara yang mencerminkan keseimbangan kekuatan realitas saat ini. Dunia tidak lagi berada di abad yang lalu. Oleh karena itu, Indonesia memandang perlu adanya keseimbangan antara kekuatan seluruh anggota di Majelis Umum PBB dengan kekuatan segelintir anggota di Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ada pula kebutuhan untuk reformasi sistemik di Dewan untuk memastikan bahwa Dewan dapat lebih representatif dan aspiratif bagi setiap kawasan dan bagi negara-negara berkembang.

DPR RI menyambut baik proses negosiasi antar pemerintah saat ini yang bertujuan untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB dan menekankan bahwa kemajuannya perlu mempertimbangkan aspirasi semua pihak yang terkait. DPR RI juga menghimbau negara-negara BRICS+ untuk terus memperkuat mekanisme Sidang Umum PBB seperti Resolusi *Uniting for Peace* (377/V) dan Mandat Tetap untuk pembahasan Sidang Umum setiap kali Veto diberikan dalam Resolusi Dewan Keamanan (A/RES/76/262).

Terkait veto di Dewan Keamanan, Delegasi DPR RI berpendapat bahwa dalam jangka panjang, veto tidak perlu dilakukan mengingat kita perlu berpikir sebagai komunitas global dalam menangani masalah perdamaian dan keamanan yang menjadi perhatian internasional. Indonesia sependapat mengenai perlunya membatasi penggunaan veto, dengan alasan yang sah mencakup kasus-kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Indonesia juga menyerukan kepada Parlemen BRICS, bahwa dalam reformasi arsitektur perdamaian dan keamanan global, pencegahan dan tata kelola pascakonflik perlu diperkuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan reformasi struktural yang mendalam terhadap PBB dan lembaga multilateral terkait lainnya guna memastikan dihormatinya hukum internasional guna menjaga ketertiban, perdamaian, dan keamanan internasional.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Delegasi DPR RI telah sukses mengikuti Sidang BRICS Parliamentary Forum untuk pertama kali, sejak Indonesia secara resmi bergabung menjadi anggota tetap BRICS. Selama mengikuti sidang Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan terhadap berbagai isu yang menjadi bahasan, serta bertukar pendapat dengan delegasi dari parlemen negara-negara lain.
2. BRICS Parliamentary Forum cukup baik dalam memposisikan diri sebagai wadah aspirasi alternatif dan penyeimbang dalam konstelasi politik dan ekonomi global yang selama ini didominasi oleh Barat. Oleh karena itu, DPR RI diharapkan dapat memanfaatkan keanggotaan di BRICS Parliamentary Forum dengan sebaik-baiknya sebagai media penyampaian kepentingan nasional Indonesia.
3. Sebagai tuan rumah pelaksanaan BRICS Parliamentary Forum, Brazil memiliki keinginan kuat untuk mendorong formalisasi dan pelembagaan BRICS. Keinginan ini tersampaikan, antara lain, melalui pidato pembukaan Sidang oleh ketua Senat Brazil. Namun demikian, keinginan ini tidak sepenuhnya disambut dengan baik oleh anggota tetap BRICS yang lain. Russia misalnya, tidak sepenuhnya setuju terhadap ide tersebut. Di sisi lain, Indonesia perlu mencermati isu ini dengan seksama karena memiliki konsekuensi terhadap Indonesia, setidaknya dari sisi finansial berupa iuran wajib.
4. Formalisasi dan pelembagaan BRICS dapat mengakibatkan organisasi ini kehilangan kekuatan utamanya sebagai wadah aspirasi alternatif dan penyeimbang politik dan ekonomi global. Sebab dengan format yang lebih resmi, dikhawatirkan BRICS akan kehilangan ciri khas fleksibilitas dan semangat inklusif yang selama ini menjadi daya tersendiri bagi negara-negara berkembang.

#### **B. Saran**

1. Mempertimbangkan posisi strategis BRICS, DPR RI disarankan untuk terlibat secara aktif di BRICS Parliamentary Forum melalui pengiriman delegasi ke setiap kegiatan-kegiatan resmi BRICS.

2. Hasil sidang yang berupa Deklarasi dapat di distribusikan dan di sosialisasikan ke Fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugas keparlemenan, terutama yang terkait erat dengan politik luar negeri dan ekonomi.

## IV. PENUTUP

### A. Ucapan Terimakasih

Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan Forum Parlemen BRICS ke-11 yang berlangsung pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia - Brazil.

Semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan BRICS di masa yang akan datang.

### B. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi BKSAP DPR RI pada Forum Parlemen BRICS ke-11 pada tanggal 3-5 Juni 2025 di Brasilia - Brazil. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2025

Ketua Delegasi BKSAP DPR-RI,

ttd

**Dr. Mardani Ali Sera**





@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY  
COOPERATION  
INDONESIAN HOUSE OF  
REPRESENTATIVES  
(BKSAP DPR RI)

Email: [biro\\_ksap@dpr.go.id](mailto:biro_ksap@dpr.go.id)

Phone: (62-21) 5715813

[ksap.dpr.go.id](http://ksap.dpr.go.id)